KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Aparat Diharapkan Sejalan dengan Presiden
Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Aparat Diharapkan Sejalan dengan Presiden

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap keterbukaan Presiden Prabowo terhadap kritik diikuti aparat penegak hukum.

JAKARTA, KOMPAS — Apresiasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menunjukkan keterbukaannya terhadap kritik. Sikap Presiden itu diharapkan diikuti oleh aparat penegak hukum dengan tidak lagi membungkam kelompok kritis karena demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pendapat dan kritik yang membangun.

Presiden Prabowo sebelum menutup pidatonya dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (20/5/2026), menyampaikan pujian dan apresiasi terhadap PDI-P. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dinilai telah berkorban karena berada di luar pemerintahannya.

Meski menginginkan semua partai berada dalam koalisinya, Prabowo menghormati sikap PDI-P. Pemerintah membutuhkan pengawasan dan kontrol dari PDI-P sebagai partai penyeimbang dalam demokrasi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun mengapresiasi pujian Presiden Prabowo atas sikap politik PDI-P tetap berada di luar pemerintahan. Pernyataan itu dianggap sebagai pengakuan atas pentingnya posisi PDI-P sebagai partai penyeimbang.

Menurut Hasto, pernyataan Presiden itu menunjukkan kesadaran bahwa demokrasi memerlukan *checks and balances*. "Pujian Presiden Prabowo justru diharapkan dapat 'melegalkan' dan memperkuat legitimasi bekerjanya fungsi penyeimbang dalam tata pemerintahan negara," kata Hasto di Jakarta, Kamis (21/5).

Berkaitan dengan hal itu, Hasto berharap keterbukaan Presiden Prabowo terhadap kritik diikuti oleh semua aparat penegak hukum dengan tidak lagi melakukan pembungkaman terhadap kelompok kritis. "Demokrasi memerlukan kritik," ujarnya.

Fungsi *checks and balances*, lanjutnya, harus dipahami semua aparatur negara, terutama aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tekanan terhadap kelompok kritis. Hasto mencontohkan, pelarangan pemutaran film *Pesta Babi* yang dinilainya tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo soal pentingnya kritik dalam demokrasi.



Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Ketua DPR Puan Maharani setelah berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan pujian kepada PDI Perjuangan, partai tempat Puan bernaung.

Berangkat dari hal itu, ia kembali menekankan, PDI-P akan terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat serta mendorong pers yang sehat dan masyarakat sipil yang kuat sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan.

Tetap bersikap kritis

Lebih jauh, Hasto menepis anggapan bahwa pujian Presiden Prabowo kepada PDI-P merupakan upaya untuk melunakkan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah. Menurut dia, PDI-P tetap akan berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.

Hasto menegaskan, sikap politik PDI-P dilandasi pijakan ideologis yang menempatkan Pancasila sebagai jalan pembebasan rakyat marhaen. Karena kesadaran sejarah itulah, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut konsisten memperjuangkan demokrasi dan berperan penting dalam agenda reformasi 1998.

PDI-P, katanya, akan terus meningkatkan kualitasnya dalam menyampaikan kebijakan alternatif melalui riset atas berbagai persoalan riil yang dihadapi bangsa dan negara, termasuk tekanan perekonomian yang harus direspons oleh pemerintah.

"PDI Perjuangan akan melanjutkan kritik yang konstruktif. Kritik berbasis data, melalui argumentasi yang jelas, lengkap dengan opsi kebijakan, serta berorientasi bagi masa depan," tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengemukakan, PDI-P akan terus bersikap kritis untuk memastikan terwujudnya program pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Namun, kritik yang disampaikan bersifat konstruktif.

"Kritiknya adalah kritik konstruktif yang membangun, bukan kritik secara negatif, namun justru memberikan masukan yang positif," katanya.

Puan menilai, fungsi kontrol di parlemen tidak semata ditentukan oleh perbandingan kekuatan politik antara partai pendukung pemerintah dan partai di luar pemerintah. Menurut dia, yang terpenting ialah substansi masukan yang diberikan agar kebijakan pemerintah dapat terus diperbaiki.

"Bukan kemudian kalah atau menang, tetapi justru memberikan masukan agar ada perbaikan," ujarnya.

Bahan evaluasi

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, berpandangan, pujian Presiden Prabowo kepada PDI-P memiliki makna ganda.

Di satu sisi, pujian itu dapat dimaknai sebagai ajakan agar PDI-P tetap mendukung kebijakan pemerintah meski berada di luar pemerintahan. Di sisi lain, bisa juga Prabowo berharap agar kritik PDI-P terhadap pemerintah tidak terlalu keras, tetapi tetap bersifat konstruktif.

"Prabowo mengharapkan hal itu untuk menjaga kondusivitas politik di Tanah Air sekaligus demokrasi tetap bersemi. Untuk itu, Prabowo tetap mengharapkan adanya *checks and balances* dari PDI-P," ujar Jamiluddin.

Dengan cara itu, imbuhnya, Prabowo ingin menunjukkan kepada publik bahwa hubungannya dengan Megawati tetap terjaga baik meski berbeda sikap politik.

Jamiluddin menilai, jika selama ini muncul persepsi bahwa Prabowo antikritik, hal itu bisa jadi dipengaruhi sikap lingkaran terdekat Presiden yang terlalu reaktif dan overprotektif terhadap kritik. Oleh karena itu, ia berharap orang-orang di sekitar Presiden diisi figur yang moderat, komunikatif, dan terbuka terhadap kritik agar setiap masukan dapat diserap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.

Ia juga berharap keterbukaan Presiden terhadap kritik menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menyikapi kelompok kritis. Kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari evaluasi dan "vitamin" untuk menyehatkan demokrasi, bukan sebagai ancaman atau tindak pidana.

"Kalau hal itu dapat dipahami dan diterima oleh lingkaran terdekat Presiden serta aparat hukum, kritik tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan bunga demokrasi yang tetap bersemi, siapa pun rezim yang berkuasa," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Agung mengatakan, sikap terbuka Presiden terhadap kritik seharusnya diikuti aparat penegak hukum dan institusi negara lainnya. Ia menyinggung pidato Presiden yang meminta aparat tidak melindungi pelaku perusakan lingkungan serta meninjau praktik kecurangan di sektor kepabeanan.

"Artinya, aparat mesti tegak lurus dengan arahan Presiden agar tidak menimbulkan ekses ataupun kontradiksi di tengah sistem politik dan sosial masyarakat," ujarnya. (BOW)